

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Peran serta masyarakat di bidang kesehatan sangat besar. Wujud nyata bentuk peran masyarakat antara lain muncul dan perkembangan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKMB), misalnya posyandu. Sebagai indikator peran aktif masyarakat melalui pengembangan UKMB digunakan persentase desa yang memiliki posyandu. Posyandu merupakan wahana kesehatan bersumberdaya masyarakat yang memberikan layanan 5 kegiatan utama (KIA, KB, Gizi, Imunisasi dan P2 Deare) dilakukan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Peran kader sangat penting karena kader bertanggung jawab dalam pelaksanaan program posyandu. Bila Kader tidak aktif maka pelaksanaan posyandu juga akan menjadi tidak lancar dan akibatnya status gizi bayi dan balita (bawah lima tahun) tidak dapat dideteksi secara dini dengan jelas. Dari laporan kegiatan pengumpulan data implementasi Hak Asasi Manusia Propinsi Aceh tahun 2011 tentang sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Aceh, posyandu yang ada di Aceh berjumlah 6.186 unit, yang aktif ada sekitar 96% dan yang pasif 4%, untuk Kabupaten Bireuen 100% posyandunya aktif, sedangkan kadernya yang aktif hanya 60% yang pasif 40%. Di Kecamatan Kuala 100% posyandunya aktif, sedangkan kader yang ada dan sudah terlatih sekitar 100 orang di mana hanya 65 orang (65%) di antaranya yang aktif (Dinkes Bireuen, 2011). Berdasarkan data Riskesdas 2010, 50 persen balita di Indonesia tidak melakukan penimbangan teratur di posyandu. Riset ini sekaligus menunjukkan kecenderungan semakin bertambah umur

seorang balita, maka tingkat kunjungan ke posyandu untuk melakukan penimbangan rutin semakin menurun. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi tingkat keberhasilan program posyandu khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang balita. Pada tahun 2012 jumlah posyandu yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia sekitar 330.000. Posyandu digerakkan oleh para kader secara sukarela yang peduli dengan perkembangan kesehatan dan gizi anak Indonesia, (Riskesdes, 2012).

Perkembangan dan peningkatan mutu pelayanan posyandu sangat dipengaruhi oleh peran serta masyarakat diantaranya adalah kader. Fungsi kader terhadap posyandu sangat besar yaitu mulai dari tahap peritisan posyandu, penghubung dengan lembaga yang menunjang penyelenggaraan posyandu, sebagai perencana pelaksana dan sebagai Pembina serta sebagai penyuluhan untuk memotivasi masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan posyandu di wilayah, khususnya pada kinerja kader itu sendiri (Isaura, 2011 : 22).

Kinerja kader posyandu menurut Maier (1965 : 11) adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang dibebankannya. Sedangkan menurut Gilbert (1977 : 10) mendefinisikan kinerja kader posyandu adalah apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam posyandu. Dari batasan-batasan yang ada dapat dirumuskan bahwa kinerja kader posyandu adalah hasil kerja yang dapat ditampilkan atau penampilan kerja seorang individu. Dengan demikian kinerja seorang individu dapat diukur dari hasil kerja, hasil tugas atau hasil kegiatan dalam kurun waktu tertentu.

Program pelayanan kesehatan terpadu atau pelayanan terpadu (posyandu) adalah suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja puskesmas. Keberlangsungan kegiatan ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dari kader posyandu sebagai pelaksana utama. Namun, tidak setiap kader menunjukkan keaktifannya dalam kegiatan ini, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, (Rewanti, 2013 : 2).

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKMB) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memperdayakan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, Syafin (2009 : 72).

Indeks pembangunan manusia (IMP) Indonesia tahun 2002 menduduki peringkat 111 dari 175 negara di dunia, dan merupakan yang terendah di antara negara-negara kawasan Asia Tenggara (Depkes RI, 2006). Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun 1997, berpengaruh terhadap kinerja kader posyandu yang turun secara bermakna. Dampaknya terlihat pada menurunnya status gizi dan kesehatan masyarakat, terutama masyarakat kelompok rentan, yakni bayi, anak balita dan ibu hamil serta ibu menyusui. Menyangkapi kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah bijak dengan mencanangkan program revitalisasi Posyandu, yaitu suatu upaya untuk meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu. Secara garis besar tujuan dari program tersebut adalah terselenggaranya kegiatan posyandu secara rutin dan berkesinambungan, tercapainya pemberdayaan tokoh masyarakat dan kader

melalui advokasi, orientasi, dan pelatihan serta tercapainya pemantapan kelembagaan posyandu, (Purwanti, 2011 : 3).

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan cakupan posyandu dengan meningkatkan peran kader dalam setiap kegiatan posyandu melalui pembinaan oleh petugas. Peranan kader sangat penting karena kader bertanggung jawab dalam pelaksanaan program posyandu. Bila kader tidak aktif maka pelaksanaan posyandu juga akan menjadi tidak lancar dan akibatnya status gizi bayi atau balita (bawah lima tahun) tidak dapat dideteksi secara dini dengan jelas. Hal ini secara langsung akan mempengaruhi tingkat keberhasilan program posyandu khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang balita (Depkes RI, 2008).

Menurut Dodo (2008 : 7), terdapatnya hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan tingkat keaktifan kader posyandu di wilayah kerja Puskesmas Sikumana. Tingginya tingkat pengetahuan kader menjadikan kinerja kader baik dan berdampak terhadap pelaksanaan program posyandu tersebut. Semakin baik atau semakin tinggi pengetahuan kader, semakin tinggi atau semakin baik pula tingkat keaktifannya dalam proses pelaksanaan kegiatan posyandu.

Sedangkan menurut Muntasir, Sinaga, Nesi dan Nabuasa (2009 : 6), tingkat motivasi kader sangat mempengaruhi prestasi kerjanya, sebagian besar (72,24%) mempunyai tingkat motivasi sedang. Sedangkan berdasarkan peran sertanya dalam pelaksanaan kegiatan posyandu pada umumnya kader aktif

dengan tingkat motivasi tinggi. Berarti semakin tinggi tingkat motivasi seorang kader semakin aktif pula dalam pelaksanaan kegiatan posyandu.

Keberhasilan kader posyandu tidak lepas pula dari kerja keras kader yang dengan sukarela mengelola posyandu di wilayahnya masing-masing. Kurangnya pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan yang memadai bagi kader menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap tugas kader, lemahnya informasi serta kurangnya koordinasi antara petugas dengan kader dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, (Depkes RI, 2006).

Menurut WHO (2004) sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas, merupakan modal utama atau investasi dalam pembangunan kesehatan. Kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan ekonomi merupakan tiga pilar yang sangat mempengaruhi kualitas hidup sumberdaya manusia yang dijabarkan dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Laporan UNDP tahun 2004 dalam pedoman umum pengelolaan posyandu menyatakan Indonesia tahun 2002 mempunyai IMP yang menduduki peringkat III dari 175 negara di dunia dan merupakan yang terendah di negara-negara Asia Tenggara.

Indonesia pada tahun 2011 memiliki 268.439 posyandu yang aktif dengan jumlah kader 131.383 orang. Presentase kader aktif secara nasional adalah 74,7% dan angka drop-out kader sekitar 25,3% dan cakupan keaktifan kader posyandu secara nasional hingga tahun 2010 baru mencapai 78% dari target 80% dan pada tahun 2011 mencapai cakupan program atau partisipasi masyarakat sangat bervariasi, mulai dari terendah 10% sampai tertinggi 80% (Depkes, 2011).

Puskesmas Bontobahari merupakan salah satu puskesmas yang ada di

Kabupaten Bulukumba yang terletak di Kecamatan Bontobahari tepatnya di Desa Tanaberu. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah kader yang ada tidak sebanding dengan jumlah kader yang aktif. Berdasarkan data Puskesmas Bontobahari tahun 2012, jumlah kader tahun 2009 dan 2010 sebanyak 138 dan yang aktif 93,5%, jumlah kader aktif menurun pada tahun 2011 yaitu 80,4% dari 138 kader. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja kader dalam kegiatan posyandu di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba tahun 2012. Kinerja kader di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba pada umumnya kurang. Sikap, motivasi, pengetahuan, masa kerja merupakan faktor yang berhubungan dengan kinerja kader. Diharapkan kepada kader posyandu agar terus menggali ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan posyandu, (Andira, 2012 : 5).

Sedangkan menurut data untuk wilayah Puskesmas Mranggen I, tercatat selama tahun 2010 jumlah Posyandu yang ada sebanyak 42 dan kader yang aktif sebanyak 152 dari 175 kader yang ada. Sedangkan pada bulan Maret dilaporkan ada 45 Posyandu dengan kader 147 orang dari 186 kader yang ada (Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, 2010, 2011). Kinerja kader Posyandu dalam pelaksanaan Posyandu di tempat penelitian dikatakan kurang, dimana kader kurang memberikan motivasi kepada ibu balita untuk masalah balita yang tidak hadir dalam pelaksanaan Posyandu dan kurang memberikan motivasi kepada ibu balita untuk kesadaran memberikan ASI eksklusif. Dimana sebagian besar kader merupakan kader baru dalam pelaksanaan Posyandu. Dan sikap kader disana kurang respon terhadap masyarakatnya. Untuk balita yang tidak hadir 3 kali

berturut-turut dalam pelaksanaan Posyandu, tidak dihiraukan oleh kader Posyandu, (Purwanti, 2011 : 5)

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi kinerja kader yaitu Umur, Sikap, Pendidikan, Motivasi, Pengetahuan, Masa Kerja, Intensif/Penghargaan dan Pelatihan. Makin lama masa kerja seorang kader pengalaman yang dimiliki semakin banyak, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk bertindak/mengambil keputusan. Sebaliknya kader pemula belum memiliki banyak pengalaman serta asing dan ragu-ragu. Kondisi ini akan menghambat peran sertanya dalam suatu kegiatan.

Hasil pengambilan data awal di Dinas Kesehatan provinsi Gorontalo pada bulan Desember 2013 terdapat jumlah posyandu di provinsi Gorontalo sampai 2013 terkini ialah 1.319 tempat tersebar di Provinsi Gorontalo, sementara jumlah kader seluruh posyandu di Provinsi Gorontalo adalah 6.595 orang, serta jumlah penduduk jiwa di Provinsi Gorontalo adalah 1.126.617 jiwa. Sementara di Kecamatan kota Utara Provinsi Gorontalo terdapat 6 Kelurahan (Dulomo Utara, Dulomo Selatan, Wongkaditi Barat, Wongkaditi Timur, Dembe Dua, dan Dembe Jaya) yang dimana jumlah posyandu yang tersebar diseluruh tempat ialah 19 posyandu, jumlah kader yang terdapat di enam Kelurahan kecamatan Kota Utara ialah 95 orang, dan jumlah penduduk jiwa di kecamatan Kota utara ialah 18.016 jiwa.

Tabel 1.1. Kader Posyandu di Kecamatan Kota Utara Tahun 2013

No	Kelurahan	Jumlah penduduk	Jumlah posyandu	Jumlah kader	Aktif F (%)	Tidak aktif F (%)
1.	Dulomo utara	2.669	4	20	16 (80%)	4 (20%)
2.	Dulomo selatan	3.741	4	20	17 (85%)	3 (15%)
3.	Wongkaditi barat	2.280	2	10	7 (70%)	3 (30%)
4.	Wongkaditi timur	4.078	4	20	15 (75%)	5 (25%)
5.	Dembe dua	2.394	3	15	10 (66,5%)	5 (33,5%)
6.	Dembe jaya	2.284	2	10	6 (60%)	4 (40%)
	Total	18.016	19	95	71 (74,7%)	24 (25,3%)

Sumber Puskesmas Wongkaditi Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah kader posyandu di wilayah Kecamatan Kota Utara adalah 19 tempat posyandu dan jumlah kader ialah 95 orang yang tersebar. Yakni Dulomo Utara adalah ada 4 tempat posyandu dan jumlah kader 20 orang, Dulomo Selatan 4 tempat posyandu dan jumlah kader 20

orang, Wongkaditi Barat 2 tempat posyandu dan jumlah kader 10 orang, Wongkaditi Timur 3 tempat posyandu dan jumlah kader 15 orang, Dembe Dua 4 tempat dan jumlah kader 20 orang, dan Dembe Jaya 2 tempat posyandu dan jumlah kader 10 orang. Sedangkan presentase kader aktif dan tidak aktif di Kecamatan Kota Utara ialah aktif 71 orang (74,7%) dan tidak aktif 24 orang (25,3 %).

Dari hasil penjelasan tabel diatas terdapat jumlah kader posyandu yang masih sedikit, di akibatkan kurangnya pengetahuan, motivasi dan pelatihan akan pola kegiatan posyandu, sehingga dapat mempengaruhi atau memperlambat kinerja kader dalam melaksanakan tugas yang ada di posyandu.

Hasil wawancara 15 orang kader di Wilayah Kecamatan Kota Utara pada bulan desember 2013 dari 5 orang kader mengatakan kurang mengikuti kegiatan posyandu karena rendahnya pengetahuan tentang kegiatan posyandu dan 5 orang kader lainnya menjelaskan tidak adanya motivasi dalam kegiatan serta 5 orang kader sisanya mengeluh kurangnya pelaksanaan pelatihan kegiatan posyandu adalah faktor yang mempengaruhi kinerja posyandu di Kecamatan Kota Utara.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti berasumsi bahwa kegiatan posyandu terhambat karena dipengaruhi oleh kinerja kader posyandu. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja kader posyandu di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya kinerja kader posyandu di Wilayah Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo.

2. Survei awal terhadap kader posyandu didapatkan informasi bahwa 15 orang kader mengatakan kurangnya pengetahuan, tidak adanya motivasi dan pelatihan dalam kinerja kader posyandu.

3. Hasil penelitian yang dilakukan Nugroho (2008), mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan, motivasi, dan pelatihan kader dapat mempengaruhi kinerja kader posyandu.

1.3 Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja kader posyandu di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo Tahun 2013?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja kader posyandu di Kecamatan Kota Utara kota Gorontalo

1.4.2 Tujuan khusus

1. Diidentifikasinya factor-faktor (pengetahuan, motivasi, pelatihan, dan insentif) dengan kinerja kader posyandu di Kecamatan Kota Gorontalo.
2. Diidentifikasinya Kinerja Kader di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo
3. Dianalisisnya hubungan pengetahuan dengan kinerja kader di posyandu di Kecamatan Kota Utara kota Gorontalo
4. Dianalisisnya hubungan motivasi dengan kinerja kader di posyandu di Kecamatan Kota Utara kota Gorontalo

5. Untuk menganalisis hubungan pelatihan dengan kinerja kader di posyandu di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo
6. Untuk menganalisis hubungan insentif dengan kinerja kader di posyandu di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja kader posyandu.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi institusi

Memberikan gambaran kepada pihak Puskesmas mengenai beberapa faktor yang berhubungan dengan kinerja kader dalam kegiatan posyandu yang dapat digunakan sebagai tambahan informasi dalam usaha usaha mengantisipasi terjadinya pengunduran diri kader posyandu.

2. Bagi ilmiah

Dapat Menambah informasi hasil penelitian yang selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti lain.

3. Bagi praktis

Bagi peneliti merupakan pengalaman berharga dalam memperluas wawasan serta menambah pengetahuan yang diperoleh pada Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan dan Keolahragaan Universitas Negeri Gorontalo.